

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DI KOTA LHOKSEUMAWE

Abhiseka Muhammad Daffa
NPP. 32.0001
Asdaf Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh
Program Studi Keuangan Publik
Email: 32.0001@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Ayu Widowati Johannes.S.STP. M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The Regional Government Information System (SIPD) which is a human resource problem, so that the quality of income reporting is still not optimal. This is the basis of the general problem of employee problems, considering that the use of the Regional Government Information System (SIPD) has been required by the central government and will certainly help regional and central governments in processing the required data in an integrated manner. Purpose: This study aims to analyze regional financial reports through the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) in Lhokseumawe City, with a focus on the implementation of the system, obstacles faced, and strategic efforts made by the Financial and Regional Management Agency (BPKD) in optimizing the function of SIPD. Method: This research uses a qualitative approach with a case study method, and data collection techniques include participant observation, semi-structured interviews with key informants, and documentation from regional financial archives. Result: The results of the study show that although SIPD has been implemented according to regulations, its effectiveness has not been fully achieved due to technical and institutional constraints. BPKAD has made various efforts such as internal training, improving coordination between work units, and technical improvements to the SIPD system. Conclusion: This study emphasizes the importance of strengthening human resource capacity, system modernization, and budget support for information technology infrastructure. The suggestions put forward are the need for ongoing training programs, periodic SIPD system updates, and cross-sector collaboration to create transparent, accountable, and integrated regional financial governance.*

Keywords: *Information Systems, Regional Financial Reports, Regional Government, SIPD.*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang menjadi permasalahan sumber daya manusia, sehingga kualitas pelaporan pendapatan masih belum optimal. Hal ini menjadi dasar permasalahan umum dari permasalahan pegawai, mengingat bahwa penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ini sudah diwajibkan oleh pemerintah pusat dan juga pastinya akan lebih membantu pemerintah daerah

dan pemerintah pusat dalam mengolah data yang diperlukan secara terintegrasi. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis laporan keuangan daerah melalui penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kota Lhokseumawe, dengan fokus pada pelaksanaan sistem, hambatan yang dihadapi, serta upaya strategis yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Daerah (BPKD) dalam mengoptimalkan fungsi SIPD. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dan teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci, serta dokumentasi dari arsip keuangan daerah. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun SIPD telah diterapkan sesuai regulasi, namun efektivitasnya belum tercapai sepenuhnya akibat kendala teknis dan kelembagaan. BPKAD telah melakukan berbagai upaya seperti pelatihan internal, peningkatan koordinasi antar unit kerja, serta perbaikan teknis pada sistem SIPD. **Kesimpulan:** Dari penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia, modernisasi sistem, serta dukungan anggaran untuk infrastruktur teknologi informasi. Adapun saran yang diajukan adalah perlunya program pelatihan yang berkelanjutan, pembaruan sistem SIPD secara berkala, serta kolaborasi lintas sektor guna menciptakan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi.

Kata kunci: Laporan Keuangan Daerah, Pemerintahan Daerah, Sistem Informasi, SIPD.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan pelaporan keuangan daerah adalah proses penyusunan, pencatatan, dan pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, serta ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pelaporan keuangan daerah ini harus dilakukan dengan tepat waktu, akurat, dan transparan, sehingga informasi yang disampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan keuangan daerah (Mardiasmo, 2020)

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance government*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Arisman, 2018). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem informasi pemerintah daerah merupakan bagian dari tuntutan masyarakat pada era reformasi terhadap pelayanan publik yang berkualitas dan dapat memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi. Oleh karena itu, kredibilitas pemerintah sangat ditentukan oleh kemampuannya mengatasi berbagai permasalahan guna menyediakan pelayanan publik yang memuaskan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, namun tidak

semua yang menjadi tujuan dari pemerintahan yang baik melalui transparansi dan akuntabilitas sistem informasi yang dapat diberikan oleh pemerintah, tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan dan permasalahan dalam pelaksanaannya. Hal ini juga terjadi dalam sistem informasi pemerintah daerah Kota Lhokseumawe.

Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji pengelolaan keuangan daerah dalam SIPD khususnya di Kota Lhokseumawe. teori Pengelolaan Keuangan Daerah menurut (Mardiasmo, 2018) dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam Pengelolaan Keuangan melalui SIPD di pemerintah daerah Kota Lhokseumawe. Dalam teori yang dijelaskan, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam optimalisasi pelaporan pendapatan daerah di SIPD, yaitu transparansi, akuntabilitas, *value for money*, keadilan dan partisipasi.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian sebelumnya tentang pengembangan perolehan pendapatan melalui penerbitan laporan keuangan organisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah dari informasi pemerintah daerah telah memberikan dampak yang signifikan dan bermanfaat bagi peneliti dalam proses penelitian ini. Namun, belum banyak kajian yang menggunakan teori yang dikemukakan (Mardiasmo, 2018). Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian terkait pengelolaan keuangan daerah dalam SIPD secara lebih mendalam.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada beberapa studi terdahulu untuk menunjukkan kebaruan serta relevansi topik yang diangkat. Penelitian oleh (Sunardi et al., 2021), menunjukkan bahwa informasi keuangan sangat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah dan juga pengendalian intern pemerintah. Sementara itu, (McCluskey et al., 2017) menemukan pendapatan teknologi dapat membantu menambah data pendapatan di berbagai sektor. Penelitian oleh (Terlizzi, 2021) mengkaji transformasi digital dalam akuntansi sektor publik melalui tinjauan literatur sistematis. Studi tersebut mengidentifikasi bahwa implementasi sistem informasi keuangan digital dalam pemerintahan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, namun memerlukan adaptasi kelembagaan yang memadai. Temuan ini memberikan kerangka konseptual penting dalam memahami dinamika implementasi SIPD di Indonesia. Penelitian (Fitriani, 2024), menyatakan bahwa penggunaan SIPD memiliki dampak langsung mengenai pengelolaan keuangan daerah dan standar LKPD. Selain itu, (Amalia dan Suwondo, 2023) mengungkapkan bahwa manajemen bagian keuangan regional dampak positif kualitas laporan keuangan dan kekayaan. Tumija, Hendra, dan Dkk, 2023 juga menunjukkan penerapan SIPD pada bidang manajemen keuangan sudah digunakan, tetapi pada dimensi sumber daya khususnya pada bidang sistem informasi akuntansi dan pelaporan, menu yang digunakan sudah ada tetapi tidak dapat diakses.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu karena secara khusus mengkaji pengelolaan keuangan daerah dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kota Lhokseumawe dengan pendekatan kualitatif. Berbeda dengan Sunardi (2021) yang menitikberatkan kepada kebijakan sistem pengendalian intern pemerintah, serta penelitian William McCluskey (2018), Lydia Fitriani (2024) maupun Mira Amalia dan Sulistia Suwondo (2023) yang meneliti pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia, penelitian ini menggunakan indikator pengelolaan menurut Mardiasmo, yaitu harus berdasarkan transparansi, akuntabilitas, *value for money*,

keadilan dan partisipasi. Selain itu, objek penelitian ini juga memiliki kekhususan karena berfokus pada aplikasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya di Kota Lhokseumawe, yang belum banyak dikaji dalam studi sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru terhadap implementasi layanan perpajakan digital di tingkat daerah.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengelolaan, faktor penghambat dan upaya dalam keuangan daerah melalui aplikasi SIPD di Kota Lhokseumawe.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Menurut (Sugiyono, 2019) penelitian kualitatif pada dasarnya adalah melakukan observasi dan wawancara terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui mengenai kondisi dan situasi sosial yang terjadi. Ini berarti bahwa pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang dilakukan terhadap suatu objek alamiah atau natural, dimana dengan berdasarkan amatan terhadap objek penelitian itu sealamiah mungkin dan secara menyeluruh. Dalam penelitian kualitatif hal yang menonjol adalah proses dan makna (perspektif informan). (Nazir, 2017) berpendapat mendefinisikan desain penelitian sebagai kerangka atau struktur yang menentukan langkah-langkah yang akan diambil dalam suatu penelitian. Desain ini mencakup berbagai elemen penting seperti masalah penelitian, tujuan penelitian, jenis data yang akan dikumpulkan, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan (Simangunsong, 2016). Desain penelitian menjadi panduan dalam memilih dan menerapkan metode yang tepat sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Penelitian ini sebagaimana dijelaskan (Ardiansyah et al., 2023), observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data di mana peneliti mengamati fenomena atau objek yang menjadi fokus penelitian secara langsung di lapangan. Observasi memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data secara alami tanpa adanya intervensi yang mengubah kondisi objek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan model wawancara (McNamara, 1999) mengatakan bahwa wawancara adalah proses interaktif di mana peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan atau responden untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang pandangan, pengalaman, sikap, atau pengetahuan mereka mengenai suatu fenomena atau topik yang sedang diteliti. Wawancara berfungsi untuk menggali informasi secara lebih detail, mendalam, dan kontekstual yang sulit didapatkan melalui metode lain, seperti survei atau observasi. Pada dasarnya wawancara adalah percakapan, namun percakapan yang memiliki tujuan. Karena banyak hal yang tidak mungkin diamati langsung.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala BPKD Kota Lhokseumawe, Sekretaris BPKD, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Kepala SUB Bidang Pelaporan dan Informasi Keuangan Daerah, Bendahara Penerima dan juga Operator. Analisis data dilakukan berdasarkan indikator pengelolaan dari (Mardiasmo, 2018), yang meliputi transparansi, akuntabilitas, *value for money*, keadilan dan partisipasi. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai pengelolaan keuangan daerah dalam SIPD di Kota Lhokseumawe.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Transparansi

Pemerintah Kota Lhokseumawe telah menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pendapatan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Mengacu pada teori transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah menurut (Mardiasmo, 2018), transparansi keuangan daerah dapat diukur melalui dua indikator utama, yaitu kemudahan akses publik terhadap laporan keuangan serta kelengkapan dan kejelasan informasi dalam sistem. Implementasi SIPD bertujuan untuk menyediakan informasi yang dapat diakses masyarakat, memungkinkan layanan pelaporan pendapatan daerah yang terintegrasi, serta memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

(K Ghani, Fawzi, dan Tooley, 2009) dalam penelitiannya tentang efektivitas format pelaporan digital menemukan bahwa sistem pelaporan keuangan berbasis teknologi informasi dapat secara signifikan meningkatkan pemahaman pengguna terhadap informasi keuangan. Namun, format penyajian informasi dan antarmuka pengguna memainkan peran krusial dalam menentukan tingkat transparansi yang dirasakan. Temuan ini relevan dengan implementasi SIPD di Kota Lhokseumawe, di mana format pelaporan dan desain sistem menjadi faktor penting dalam memudahkan akses publik terhadap laporan keuangan

Dalam konteks optimalisasi transparansi pelaporan pendapatan di BPKD Kota Lhokseumawe, terdapat beberapa tantangan yang masih dihadapi, terutama terkait budaya kerja dan tingkat pemahaman pengelola terhadap SIPD. Meskipun struktur organisasi telah menempatkan para pengelola SIPD sesuai dengan Keputusan Wali Kota Lhokseumawe tentang Tim Pengelola SIPD Tahun Anggaran 2023, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pengelola belum sepenuhnya mampu mengoperasikan sistem ini secara optimal. Hal ini terlihat pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, yang menjadi indikator utama dalam mewujudkan transparansi keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pengelola dalam menggunakan SIPD.

a. Kemudahan akses publik terhadap laporan keuangan

Tujuan dari penerapan kebijakan dalam pengelolaan pelaporan pendapatan daerah adalah agar organisasi perangkat daerah (OPD) dapat bekerja sesuai dengan aturan penggunaan SIPD yang berlaku, terkhusus dalam tahapan pelaporan sehingga output yang dihasilkan dapat berbuah

Langkah-langkah strategis seperti peningkatan intensitas pelatihan, pendampingan teknis, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi menjadi krusial agar transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat benar-benar diwujudkan sesuai dengan prinsip yang dikemukakan oleh (Mardiasmo, 2018). Dengan demikian, SIPD tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai instrumen utama dalam menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

b. Kelengkapan dan kejelasan informasi dalam sistem

Kelengkapan dan kejelasan dari informasi sangat dibutuhkan baik itu di lingkungan pribadi maupun di lingkungan organisasi memiliki dampak positif dan negatif tergantung dari sudut pandang di tiap bidang, terkhusus di lingkungan organisasi kerja BPKAD Kota Lhokseumawe sudah mulai mengarah kearah digitalisasi dan mulai melengkapi kejelasan informasi. Hal ini ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan aplikasi untuk mengelola siklus keuangan daerah sejak dimunculkannya kebijakan untuk menggunakan SIPD. Walaupun masih berjalan belum optimal, namun hal ini dapat dikatakan sebagai kemajuan budaya 80 organisasi karena telah menyesuaikan dengan zaman digital yang berlangsung dimana-mana.

3.2. Akuntabilitas

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, informasi terkait optimalisasi pelaporan pendapatan di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) telah tersedia dan dapat diakses sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dikemukakan oleh (Mardiasmo, 2018). Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah menuntut adanya laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Dalam proses pelaporan pendapatan, akuntabilitas diwujudkan melalui penggunaan sistem yang dapat mencatat dan mempertanggungjawabkan transaksi keuangan daerah secara sistematis. Saat ini, terdapat dua aplikasi utama yang digunakan dalam pencatatan dan pelaporan pendapatan daerah, yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang diterapkan berdasarkan kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, serta FMIS, yang merupakan sistem sebelumnya sebelum kebijakan penggunaan SIPD diberlakukan. Penggunaan kedua sistem ini mencerminkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah karena memungkinkan pencatatan yang lebih terstruktur, pelaporan yang lebih akurat, serta pertanggungjawaban yang lebih jelas kepada pemangku kepentingan. Namun, untuk memastikan efektivitas dalam implementasi SIPD sebagai sistem utama, diperlukan peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah melalui pelatihan berkelanjutan dan penguatan mekanisme evaluasi. Hal ini sesuai dengan konsep akuntabilitas dikemukakan oleh (Mardiasmo, 2018), di mana setiap sistem yang diterapkan harus dapat memberikan pertanggungjawaban jelas, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

a. Mekanisme Pertanggungjawaban Laporan Keuangan

Mekanisme pertanggungjawaban laporan keuangan merupakan aspek krusial dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah yang baik dan terbuka. Dalam konteks penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kota Lhokseumawe, pertanggungjawaban laporan keuangan telah mengalami transformasi signifikan dari sistem konvensional menjadi sistem berbasis teknologi yang lebih terintegrasi. Sub bab ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana mekanisme pertanggungjawaban laporan keuangan daerah dijalankan melalui SIPD di Kota Lhokseumawe, termasuk prosedur penyusunan, verifikasi, validasi, hingga pelaporan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan regulasi yang berlaku.

b. Kesesuaian Pelaporan dengan Regulasi Pemerintah

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kota Lhokseumawe tidak dapat dilepaskan dari aspek kepatuhan terhadap regulasi pemerintah yang berlaku. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pengelolaan laporan keuangan daerah melalui SIPD di Kota Lhokseumawe telah berupaya untuk menyesuaikan dengan regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3.3. Value for Money

Prinsip Value for Money dalam pengelolaan keuangan daerah juga menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya secara ekonomis dan optimal. Di BPKAD Kota Lhokseumawe, spesifikasi dasar sarana dan prasarana dalam mendukung pelaporan pendapatan telah tersedia dengan baik, termasuk alat-alat yang memadai untuk mendukung operasional sistem.

Ketersediaan fasilitas yang layak dan dapat dioperasikan tanpa hambatan menunjukkan bahwa penggunaan anggaran dalam penyediaan sarana dan prasarana telah dilakukan secara ekonomis dan efektif. Dengan adanya fasilitas yang memadai, aparatur dapat bekerja lebih efisien dalam mengelola pelaporan keuangan daerah, sehingga prinsip Value for Money dapat diwujudkan dalam aspek pelayanan publik yang lebih baik.

Dalam sistem pemerintahan yang terintegrasi, dibutuhkan peran teknologi yang memadai didalamnya. Untuk itu, layanan informasi yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Masyarakat harus saling terhubung atau terintegrasi sehingga dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat serta mempermudah seluruh lapis pemerintahan untuk mengakses data publik yang ada. Untuk menyukseskan penyelenggaraan pemerintahan, dibutuhkan akses teknologi yang memadai untuk mendukung, menyesuaikan dengan keadaan zaman yang semakin maju dan modern. Dan pada penelitian ini, pemanfaatan SIPD difokuskan untuk mengoptimalkan pelaporan pendapatan daerah.

a. Efisiensi Penggunaan SIPD-RI

Untuk mengoperasikan sistem SIPD, tidak dibutuhkan anggaran yang terlalu rumit dan dapat memudahkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah, hal ini karena SIPD diakses oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia, sehingga diperlukan konektivitas yang memadai untuk dapat berkolaborasi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, SIPD ini masih sulit untuk diakses pada waktu tertentu, terlebih pada waktu-waktu penting dimana bendahara penerimaan se-Indonesia harus mengakses secara bersamaan sehingga server SIPD ini menjadi error dan tidak optimal untuk digunakan pada waktu tersebut. Hal ini membuat bendahara penerimaan akhirnya harus menginput data diluar jam kerja bahkan hingga dini hari.

b. Kinerja Sistem dalam Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Mulya Vika S.STP, mengatakan bahwa:

“Untuk mengakses SIPD ini tentunya menggunakan jaringan dan perangkat elektronik yang memadai. Perangkat elektronik yang dimaksud berupa, komputer, laptop, dan perangkat lainnya yang mendukung. Proses pelaporan pendapatan ini sebenarnya dapat dilakukan dimana saja, tidak selalu harus di kantor.”

Berdasarkan yang telah dikemukakan pada wawancara diatas, dapat dilihat bahwa untuk mengakses SIPD ini sendiri tidak selalu harus berada di kantor. Maka dari itu, untuk memberikan informasi kepada Masyarakat tidak harus melalui komputer kantor, pegawai yang dalam hal ini bendahara penerimaan tinggal masuk menggunakan akun yang disediakan dalam aplikasi SIPD dan mengelola laporan pendapatan daerah yang ada didalamnya. Dalam memudahkan bendahara penerimaan untuk mengakses SIPD, BPKAD menyediakan sarana dan prasarana. memudahkan bendahara penerimaan untuk mengakses SIPD, BPKAD menyediakan sarana dan prasarana.

3.4. Keadilan

Dalam perspektif *keadilan*, setiap pengelola harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk meningkatkan keterampilannya dalam mengelola sistem pelaporan pendapatan. Oleh karena itu, program pelatihan dan pendampingan perlu dilakukan secara merata agar seluruh pengelola memiliki kemampuan yang setara dalam mengoperasikan SIPD dan memastikan pelaporan keuangan berjalan dengan optimal.

Masih banyak pengelola SIPD yang belum memahami secara menyeluruh tata cara pelaporan keuangan dalam sistem ini. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, BPKAD Kota Lhokseumawe telah mengambil langkah strategis dengan menyediakan bimbingan fleksibel serta memanfaatkan platform digital seperti YouTube sebagai media pembelajaran tambahan.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *keadilan* dalam pengelolaan keuangan daerah, karena memberikan akses yang sama kepada semua pengelola untuk memperoleh informasi dan solusi terkait penggunaan SIPD. Dengan adanya bimbingan yang fleksibel dan berbasis teknologi, diharapkan setiap pengelola dapat mengembangkan keterampilan mereka tanpa terkendala oleh keterbatasan akses terhadap pelatihan formal, sehingga pelaporan pendapatan daerah dapat dilakukan secara lebih adil dan merata.

a. Pemerataan Akses Sistem Informasi

Pemerataan akses sistem informasi merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kota Lhokseumawe. Sub bab ini akan mengkaji sejauh mana distribusi dan ketersediaan akses terhadap SIPD telah menjangkau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pengguna yang berkepentingan dalam pengelolaan laporan keuangan daerah. Analisis pemerataan akses ini mencakup aspek infrastruktur teknologi, distribusi hak akses sistem, kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem, serta upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam mengatasi kesenjangan digital di antara berbagai OPD. Penelitian ini juga akan membahas tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan keadilan akses sistem informasi beserta strategi yang diterapkan untuk memastikan bahwa SIPD dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pihak yang terlibat dalam rantai pengelolaan keuangan daerah, sehingga tujuan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah dapat tercapai secara menyeluruh.

Dengan demikian, dalam konteks Kota Lhokseumawe, pengelolaan laporan keuangan melalui SIPD telah menunjukkan upaya menuju keadilan dalam pengelolaan keuangan daerah. Meski masih terdapat tantangan, kebijakan fasilitasi akses pelatihan dan informasi secara merata menjadi langkah progresif untuk mewujudkan pengelolaan yang tidak hanya efektif, tetapi juga adil dan inklusif.

b. Representasi Kepentingan Berbagai Daerah Stakeholder

Pengelolaan laporan keuangan daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kota Lhokseumawe melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki kebutuhan dan perspektif berbeda. Representasi kepentingan stakeholder dalam implementasi SIPD menjadi salah satu faktor krusial yang menentukan efektivitas sistem ini dalam memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Upaya-upaya penyempurnaan terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk meningkatkan representasi kepentingan stakeholder, antara lain melalui pengembangan modul-modul tambahan, penyesuaian format pelaporan, dan peningkatan akses bagi berbagai pihak. Namun, proses ini masih memerlukan pendekatan yang lebih partisipatif dan inklusif untuk memastikan bahwa SIPD benar-benar menjadi instrumen yang efektif dalam memenuhi kebutuhan seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan keuangan daerah.

3.5. Partisipasi

Partisipasi merupakan elemen penting dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kota Lhokseumawe. Keterlibatan aktif dari berbagai pihak, khususnya pengguna langsung sistem, sangat menentukan keberhasilan dan keberlanjutan SIPD dalam pengelolaan laporan keuangan daerah.

a. Mekanisme Umpan Balik dari Pengguna

Pemerintah Kota Lhokseumawe telah mengembangkan beberapa saluran untuk menampung masukan pengguna, meliputi fitur helpdesk dalam sistem, grup WhatsApp khusus operator SIPD dari seluruh OPD, pertemuan evaluasi berkala, formulir survei kepuasan pengguna, dan email khusus untuk pelaporan masalah teknis. Tantangan utama

dalam pengelolaan umpan balik adalah hierarki pengelolaan SIPD, dimana masalah teknis lokal dapat ditangani langsung, namun usulan perubahan fitur atau struktur pelaporan harus dikoordinasikan dengan Kemendagri melalui proses yang lebih panjang. Meski demikian, terdapat peningkatan signifikan dalam responsivitas terhadap umpan balik sejak tahun kedua implementasi, dengan pengembangan prosedur penanganan yang lebih terstruktur, penurunan keluhan berulang, dan peningkatan kepuasan pengguna berdasarkan hasil survei internal.

b. Sosialisasi dan Pelatihan Penggunaan Sistem

Dalam hal sosialisasi dan pelatihan penggunaan sistem, Pemkot Lhokseumawe menerapkan pendekatan bertahap yang diawali dengan workshop pengenalan untuk pimpinan OPD, dilanjutkan dengan pelatihan teknis bagi operator, pendampingan on-site di masing-masing OPD, penyediaan modul dan video tutorial online, serta pelatihan penyegaran untuk mengakomodasi pembaruan sistem. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelatihan meliputi keterbatasan waktu, keragaman tingkat pemahaman dan keterampilan peserta, serta kebutuhan pelatihan berkala seiring pembaruan fitur sistem. Untuk mengatasi tantangan tersebut, mulai tahun 2024 diterapkan sistem pelatihan berjenjang dan berkelanjutan dengan tiga level (dasar, menengah, lanjutan) disertai sertifikasi. Strategi baru ini juga mencakup pembentukan komunitas praktisi SIPD dan pengembangan metode blended learning yang mengkombinasikan pelatihan tatap muka dengan e-learning. Hasil evaluasi menunjukkan keberhasilan upaya ini dengan peningkatan tingkat kepatuhan pelaporan keuangan melalui SIPD dari 73% pada tahun pertama implementasi menjadi 92% pada tahun ketiga.

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi SIPD di Kota Lhokseumawe telah berupaya meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, namun masih menghadapi beberapa tantangan terutama terkait budaya kerja dan tingkat pemahaman pengelola terhadap SIPD. Sama halnya dengan temuan penelitian Sunardi (2021) yang menyatakan bahwa informasi keuangan sangat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah dan sistem pengendalian intern berperan penting dalam mengawasi laporan keuangan. Kedua penelitian sama-sama menekankan pentingnya kualitas informasi keuangan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan daerah.

Temuan penelitian ini memperkuat temuan penelitian William McCluskey (2018) bahwa modernisasi dalam manajemen pendapatan melalui teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam pengumpulan pendapatan. Dalam penelitian ini, pemanfaatan SIPD di Kota Lhokseumawe juga diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaporan pendapatan daerah. Meskipun sama-sama membahas tentang pemanfaatan teknologi informasi, penelitian William McCluskey (2018) menggunakan sistem lokal di daerah Tanzania yaitu Local Government Revenue Collection Information System (LGRICIS), sedangkan penelitian ini menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang diterapkan di Indonesia.

Sama halnya dengan temuan penelitian Lydia Fitriani (2024), penelitian ini menemukan bahwa penggunaan SIPD memiliki dampak langsung terhadap pengelolaan keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan ini memperkuat penelitian sebelumnya karena keduanya menunjukkan hubungan positif antara implementasi SIPD dengan peningkatan kualitas laporan keuangan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak pengelola SIPD yang belum memahami secara menyeluruh tata cara pelaporan keuangan dalam sistem ini. Temuan ini sejalan dengan penelitian Mira Amalia dan Sulistia Suwondo (2023) yang menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki dampak positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kedua penelitian sama-sama mengidentifikasi pentingnya kompetensi SDM dalam pengelolaan keuangan daerah.

Temuan penelitian ini menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi SIPD di Kota Lhokseumawe, terutama terkait dengan akses sistem yang sering mengalami gangguan pada waktu-waktu tertentu. Temuan ini sejalan dengan penelitian Tumija, Asep Hendra, dan Marja Sinurat (2023) yang menemukan bahwa implementasi SIPD di Kota Semarang juga menghadapi tantangan seperti daya server yang tidak mencukupi dan menu yang belum tersedia untuk laporan tertentu.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian (Edelmann, Haug, dan Mergel, 2023) yang menganalisis tantangan dan peluang dalam transformasi digital akuntansi sektor publik. Mereka menekankan bahwa keberhasilan implementasi sistem informasi keuangan digital tidak hanya bergantung pada aspek teknologi, tetapi juga membutuhkan perhatian terhadap pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan perubahan budaya organisasi. Hal ini memperkuat temuan dalam penelitian ini bahwa tantangan utama implementasi SIPD di Kota Lhokseumawe tidak hanya terkait infrastruktur teknologi, tetapi juga kompetensi pengguna dan budaya kerja yang perlu beradaptasi dengan sistem baru.

3.7. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan temuan menarik terkait penerapan SIPD yang belum optimal, penelitian ini juga mengungkap beberapa temuan menarik lainnya yang patut diperhatikan. Salah satu hal yang cukup menonjol adalah peran informal dari individu-individu tertentu dalam keberlangsungan pengelolaan laporan keuangan melalui SIPD. Meskipun sistem ini dirancang untuk bersifat sistematis dan berbasis teknologi, dalam praktiknya pelaksanaan di lapangan masih sangat bergantung pada pegawai tertentu yang dianggap menguasai sistem lebih baik dibandingkan yang lain. Ketergantungan terhadap “operator kunci” ini menimbulkan potensi risiko, seperti stagnasi proses pelaporan apabila pegawai tersebut tidak hadir atau berpindah tugas.

Selain itu, temuan lain menunjukkan bahwa adanya persepsi berbeda antarinforman terkait tujuan dan manfaat penggunaan SIPD. Beberapa pegawai melihat SIPD sebagai tambahan beban administratif, bukan sebagai alat bantu yang memudahkan pekerjaan. Persepsi ini muncul akibat kurangnya pemahaman mengenai integrasi data antarbagian, serta belum meratanya pelatihan lintas bidang. Di sisi lain, masyarakat sebagai pengguna informasi publik juga belum mendapatkan akses yang cukup terhadap keluaran dari SIPD, seperti laporan realisasi anggaran yang seharusnya dapat diakses dengan mudah untuk mendukung transparansi. Temuan menarik lainnya adalah belum adanya mekanisme umpan balik yang jelas dari pengguna SIPD, baik internal maupun eksternal. Padahal, keberadaan sistem informasi semestinya memungkinkan terjadinya dialog dua arah guna penyempurnaan sistem secara berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa SIPD di Kota Lhokseumawe masih cenderung bersifat satu arah dalam pengelolaannya, yaitu fokus pada input dan output data, namun belum memberikan ruang yang cukup untuk evaluasi dari pengguna.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kota Lhokseumawe telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, value for money, keadilan, dan partisipasi. SIPD memberikan kontribusi positif dalam membantu proses pencatatan dan pelaporan keuangan menjadi lebih sistematis, efisien, dan real-time. Namun, implementasi SIPD masih belum optimal karena belum semua perangkat daerah memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia secara maksimal. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa faktor penghambat, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya menguasai teknis penggunaan SIPD, minimnya pelatihan berkelanjutan, serta infrastruktur teknologi informasi yang belum memadai, seperti jaringan internet yang tidak stabil dan keterbatasan perangkat keras. Hambatan-hambatan ini berdampak pada keterlambatan proses pelaporan serta mengurangi efisiensi kerja. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Lhokseumawe telah melakukan sejumlah upaya, di antaranya menyelenggarakan pelatihan internal dan pendampingan teknis kepada pegawai yang menangani SIPD, serta meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah agar proses

pelaporan lebih terintegrasi dan tepat waktu. Selain itu, pemerintah daerah juga terus mengusulkan peningkatan infrastruktur teknologi kepada pemerintah pusat guna mendukung kelancaran operasional SIPD.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama dalam upaya memperoleh data sebanyak-banyaknya dari operator, mengingat keterbatasan waktu dan biaya dalam penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian: Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dalam SIPD di Kota Lhokseumawe khususnya dan Provinsi Jawa Tengah pada umumnya.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada BPKD Kota Lhokseumawe dan seluruh pihak yang membantu menyelesaikan penelitian.



VI. DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Mira, dan Sulistia Suwondo. 2023. "Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survei pada SKPD di Kabupaten Bandung Barat) The Effect of Regional Financial Management and Human Resource Competence on the." *Indonesian Accounting Research Journal* 4(1):79–89.
- Ardieansyah, Asmungi, dan Latip. 2023. *Metodologi Penelitian Sosial*. 1 ed. Yogyakarta: Deepublish.
- Arisman. 2018. "Analisis Determinasi Kualitas Laporan Keuangan Dan Hubungannya Dengan Lakip SKPD Di Kota Jambi." *Jurnal Akuntansi* 1.
- Edelmann, Noella, Nathalie Haug, dan Ines Mergel. 2023. "Digital Transformation in the Public Sector."
- Fitriani, Lidya. 2024. "Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Dan Dampaknya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Dimoderasi Oleh Teknologi Informasi Tesis." 1–121.
- K Ghani, Erlane, Laswad Fawzi, dan Stuart Tooley. 2009. "Digital Reporting Formats: Users' Perceptions." *International Journal of Digital Accounting Research*.
- Mardiasmo. 2018a. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2018b. *OTONOMI & MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH*. Yogyakarta: ANDI.
- McCluskey, William, Chyi-Yun Huang, Patrick Doherty, Riël Franzsen, dan Paul Fish. 2017. *Using information and communication technology to enhance local government revenue collection in Tanzania*. WP/18/08). [https://www. up. ac. za/media/shared/223/Working Papers/ictand](https://www.up.ac.za/media/shared/223/WorkingPapers/ictand....)
- McNamara, C. 1999. *General Guidelines for Conducting Interviews*. Sage: Minnesota.
- Nazir, M. 2017. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Simangunsong, Fernandes. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sunardi, Etty Murwaningsari, Dwi Martani, dan Sekar Mayangsari. 2021. "The Role of Government Internal Control System Quality in Moderating the Relationship of Financial Reports Quality and Local Government Performance." *Account and Financial Management Journal* 06. doi: 10.47191.
- Terlizzi, Andrea. 2021. "The Digitalization of the Public Sector: A Systematic Literature Review." *The Italian Journal of Public Policy* 16:5–38. doi: 10.1483/100372.
- Tumija, Asep Hendra, dan Dkk. 2023. "Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah (Siagian , n . d .). Manusia telah mengembangkan peningkatan teknologi ya." *Jurnal Media Birokrasi* 5(1):79–91.